

Analisis Problematika Pendistribusian Zakat Terhadap Masyarakat Miskin Di Provinsi Aceh

Damanhur¹, Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan² dan Ichsan³

^{1, 2, 3} Universitas Malikussaleh

Email Correspondent : damanhur@unimal.ac.id

Abstract: *This research is very important to do because it is necessary to do an in-depth study by combining theoretical and field studies on Islamic economic concepts with zakat distribution instruments as poverty alleviation in Aceh province. The potential is quite large because the majority of Aceh's population are adherents of the Islamic religion. The purpose of this study is to look at the problems in the distribution of zakat carried out by Baitul Mal Aceh as an effort to alleviate poverty. This type of research is a descriptive qualitative research, which begins with a literature study and then field studies from several zakat management organizations, academics, government and practitioners. The technique used is a purposive sampling technique which is carried out in the application of field studies where the field study in this research is to interview experts who are experts in the field of zakat in Baitul Mal Aceh. This study will explain the problems that occur in the distribution of Zakat to the Poor in Aceh Province. The results of the study are expected that through the problems of distributing zakat, it will improve the standard of living of the people who are good and able to become a learning solution for Baitul Mal Aceh in alleviating poverty.*

Keywords : *Problems, distribution of zakat, poverty.*

Abstrak: *Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan dikarenakan perlu dilakukan sebuah penelitian yang mendalam dengan menggabungkan kajian teoritis dan lapangan mengenai konsep-konsep ekonomi syariah dengan instrumen distribusi zakat sebagai pengentasan kemiskinan yang ada di provinsi Aceh. Potensi yang cukup besar di karenakan mayoritas penduduk Aceh merupakan penganut agama Islam. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat peroblematika dalam pendistribusian zakat yang di lakukan oleh Baitul Mal Aceh sebagai uapaya dalam pengentasan kemiskinan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuliitatif deskriptif, yang dimana di awali dari studi literature dan kemudian studi lapangan dari beberapa organisasi pengelola zakat, akademisi, pemerintah dan praktisi. Teknik yang digunakan adalah teknik purposive sampling yang di lakukan dalam penerapan studi lapangan di mana studi lapangan dalam penelitian ini adalah mewawancarai para pakar yang expert dalam bidang zakat yang ada di Baitul Mal Aceh. Penelitian ini akan menjelaskan problematika yang terjadi dalam pendistribusian Zakat Terhadap Masyarakat Miskin di Provinsi Aceh. Hasil penelitian diharapkan bahwa melalui problematika pendistribusian zakat akan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang baik dan mampu menjadi solusi pembelajaran bagi Baitul Mal Aceh dalam pengentasan kemiskinan.*

Keywords : *Problematika, pendistribusian zakat, kemiskinan.*

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang selalu menghimpit masyarakat tidak hanya mengenai pendapatan masyarakat saja melainkan juga rendahnya pemenuhan kebutuhannya pokok sehari-hari (Prasetyo et al., 2015). Pada konteks ini, problematika kemiskinan erat berkaitan dengan terbatasnya lahan suatu pekerjaan, pendidikan yang rendah serta tidak adanya modal untuk dapat membuka usaha sehingga berdampak terhadap banyaknya pengangguran (Kurnianto, 2004). Kemiskinan merupakan problematika yang kerap terjadi terhadap negara berkembang khususnya pada Negara Indonesia. Oleh karena itu menjadi hal yang penting pembahasan solusi dan penanggulangan kemiskinan pada semua Negara (Todaro & Smith, 2000).

Studi komprehensif yang dilakukan oleh Bank Dunia yaitu memperkirakan 1,2 miliar jumlah penduduk warga negara dunia yang berada pada garis kemiskinan dengan berbagai faktor terutama pada sektor ekonomi (World Bank Institute, 2004).

Kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2019 sebesar 25,14 juta penduduk, jika di lihat dari persentase Maret 2019 penduduk miskin di Indonesia tercatat 9,41 persen menurun pada tahun sebelumnya menjadi 9,82 persen. Meski demikian, kemiskinan masih menjadi persoalan Negara di Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2019 angka kemiskinan Aceh 15,01 % tahun 2020 menjadi 15,43% dalam hal ini naik sebesar 0,42%, masih rendah dibandingkan dengan kenaikan secara nasional yang mencapai 0,93 poin

Upaya dalam penanggulangan permasalahan kemiskinan hendaknya dapat di mengerti dan di pahami sebagai persoalan dunia secara global. Agama Islam dalam hal ini, menawarkan solusi kepada manusia yang sifatnya universal untuk mewujudkan kehidupan sejahtera secara bersama. Artinya ajaran agama Islam mengajarkan prinsip hidup bagi manusia agar menjadi manusia rahmat bagi manusia dan alam semesta (Arthur, 2007)

Dalam hal ini zakat menjadi salah satu instrumen yang bisa mencegah terjadinya kemiskinan, dengan pengelolaan yang baik menjadikan zakat dapat terus di kembangkan. Pada artikel ini akan membahas tentang problematika yang terjadi dalam pendistribusian zakat terhadap masyarakat miskin di provinsi Aceh.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi hal-hal yang menjadi masalah dalam pendistribusian zakat pada Baitul Mal

Aceh, kemudian untuk dapat dipakai sebagai landasan dalam memberikan berbagai alternatif pemecahan dan strategi kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

zakat

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah di sepakati (*māliyyah ijtīmā'īyyah*) yang memiliki posisi strategis, baik di lihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam ketiga dari rukun Islam yang lima. Sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemilik harta, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. (Hafidhuddin, 2002)

Zakat memiliki potensi yang besar menanggulangi permasalahan di Indonesia dalam seperti penanggulangan kemiskinan, akses pendidikan dan kesehatan bagi para mustahik zakat, namun implementasi zakat (Alam, 2018)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yang dimana diawali dari studi literatur dan kemudian studi lapangan dari beberapa organisasi pengelola zakat, akademisi, pemerintah dan praktisi. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk membangun sebuah analisa yang kongkrit pada problematika pendistribusian zakat di Baitul Mal Aceh

Sumber data penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dari wawancara dengan praktisi Amil dan akademisi yang dianggap pakar dan mengetahui tentang pendistribusian zakat yang terjadi di Baitul Mal. Selain itu, data diperoleh melalui kajian kepustakaan berupa penelusuran literatur-literatur yang terkait dengan fokus penelitian.

Teknik yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* yang di lakukan dalam penerapan studi lapangan di mana studi lapangan dalam penelitian ini adalah mewawancarai para pakar yang expert dalam bidang zakat yang ada di Baitul Mal Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini penulis melakukan *Indepth Interview* atau berdiskusi secara terbuka kepada para pakar zakat terkait dengan masalah pendistribusian zakat dengan mendalami beberapa kajian pustaka melalui literatur-literatur yang terkait

dengan pendistribusian zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Setelah melakukan hal tersebut, kemudian dilakukan di komposisi masalah yang dikonstruksikan dalam sebuah model agar dapat memudahkan peneliti dan responden dalam memahami masalah pendistribusian zakat. Setelah dilakukan dekomposisi masalah, maka diperoleh kerangka umum analisis masalah memiliki 4 (Empat) buah klaster masalah, yaitu

1. Aspek memiliki 2 elemen, yaitu masalah aspek internal dan masalah aspek eksternal
2. Masalah aspek Internal memiliki 2 elemen yaitu masalah SDM dan masalah hukum dan tata Kelola
3. Masalah aspek Eksternal memiliki 2 elemen yaitu masalah sosial dan masalah ekonomi.

Masalah internal adalah masalah yang berasal dari dalam lembaga itu sendiri. Pada penelitian ini yang menjadi sisi Internal adalah Baitul Mal Aceh. Faktor serta peran dari internal merupakan yang terpenting dalam pendistribusian zakat itu sendiri. Tepat atau tidaknya pendistribusian zakat tergantung kepada lembaga itu sendiri yang mengelola lalu mendistribusikan zakatnya kepada masyarakat.

Ada terdapat beberapa masalah internal yaitu; masalah SDM memiliki 3 elemen yaitu, Sebagian kecil tupoksi kinerja diluar keahlian atau skill, Pemberdayaan Amil belum maksimal, dan Mutasi pegawai struktural yang tidak sesuai dengan keahliannya. Kemudian masalah hukum dan tata kelola memiliki 5 elemen yaitu, peralihan dana zakat dari cash ke non-cash (transfer), belum memiliki database mustahik secara komprehensif, pendistribusian sebagian zakat yang tidak tepat sasaran, kurangnya koordinasi Baitul Mal dengan Lembaga Amil Zakat Swasta, dan belum adanya sistem informasi dan teknologi di Baitul Mal.

Aspek Eksternal adalah aspek-aspek yang berasal dari luar Lembaga. Pada penelitian ini yang menjadi sisi Eksternal adalah masyarakat dan pemerintah. Terdapat beberapa aspek masalah internal, diantaranya yaitu; Masalah sosial memiliki 3 elemen yaitu, minimnya sinergitas dengan LAZ Swasta, faktor lingkungan dan kondisi geografis, dan khilafiah masalah zakat kontemporer. Sedangkan Masalah ekonomi memiliki 2 elemen yaitu, minimnya zakat produktif ke masyarakat dan kurangnya pendamping pembinaan zakat produktif terhadap UMKM.

Berdasarkan hasil wawancara dan kajian literatur, kedua aspek tersebut mengalami masalah yang harus diselesaikan seperti yang pertama adalah terkait dengan aspek internal. Dalam hal ini,

pakar ataupun para responden lainnya memiliki paradigma yang sama, dalam artian persamaan persepsi bahwa aspek internal lebih penting daripada aspek eksternal. Aspek internal seperti masalah SDM, masalah hukum dan tata kelola, solusi SDM serta solusi hukum dan tata kelola. Hal ini dikarenakan sebagian masalah pendistribusian zakat yang terjadi di masyarakat merupakan tantangan yang harus dihadapi pihak internal.

Kemudian permasalahan kedua yaitu terkait dengan aspek eksternal adalah mengenai masalah sosial dan masalah ekonomi yang terjadi masyarakat dan pemerintahan serta bagaimana solusi atas segala permasalahan tersebut. Hal ini juga dianggap penting dikarenakan Baitul Mal harus terus berinovasi dan berada dekat dengan masyarakat sekitar.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang mendalam oleh beberapa responden, ditemukan adanya masalah lokasi dan letak geografis pada pendistribusian zakat. Hal ini dianggap penting agar dapat terwujudnya pemerataan distribusi. Agar masyarakat yang jauh dan sulit dijangkau dapat menerima apa yang menjadi haknya.

Temuan di atas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fiqih Afriadi dan Yulizar D Sanrego (2016) tentang Mengurai Permasalahan Distribusi Zakat Kepada Fakir Miskin: Pengalaman Organisasi Pengelola Zakat Baznas, Dompot Dhuafa, Dan Lazizmu menyimpulkan lima permasalahan distribusi zakat kepada fakir miskin, yaitu (1) permasalahan yang datang dari internal, (2) permasalahan dari hubungan antar OPZ, (3) permasalahan yang datang dari sisi mustahik, (4) permasalahan dari sisi pemerintah, dan (5) permasalahan dari masyarakat dan umum. Dari berbagai permasalahan tersebut permasalahan yang datang dari Internal OPZ menjadi permasalahan yang paling prioritas (Fiqih Afriadi, 2016).

Selain itu hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tika Widiastuti, Eko Fajar Cahyono, dkk tentang *Optimizing zakat governance in East Java using analytical network process (ANP): the role of zakat technology (ZakaTech)* menyimpulkan masalah tata kelola dibagi menjadi empat aspek, yaitu (1) lembaga zakat seperti keterbatasan SDM lembaga Amil zakat baik dari segi jumlah maupun kualitas, minimnya pengetahuan Amil sehingga kemampuan Amil terbatas, (2) muzakki seperti kurangnya kesadaran, pengetahuan dan pemahaman untuk membayar zakat, kurangnya kepercayaan terhadap Lembaga zakat, (3) mustahik seperti keterbatasan informasi tentang keberadaan mustahik, dan

rendahnya motivasi serta kemampuan mustahik untuk berkembang. (4) dukungan hukum seperti kurangnya pengaturan zakat sebagai pengurang pajak langsung (kredit pajak). Dari berbagai permasalahan tersebut, masalah Lembaga zakat menjadi permasalahan yang paling prioritas (Widiastuti et al., 2021).

Masalah ekonomi seperti minimnya zakat produktif ke masyarakat dan kurangnya pendamping pembinaan zakat produktif terhadap UMKM. Program pembinaan zakat produktif sudah berjalan sejak lama pada Baitul Mal. Namun yang menjadi masalah disini masih banyak masyarakat yang memiliki usaha namun belum mendapatkan bantuan program zakat produktif oleh Baitul Mal. Hal ini dapat terjadi dikarenakan banyaknya sebab sehingga belum merata nya program zakat produktif di masyarakat. Permasalahan pertama minimnya zakat produktif berkaitan erat dengan masalah yang kedua yaitu kurangnya pendamping pembinaan zakat produktif, hal ini disepakati oleh responden bahwa dalam pembinaan zakat produktif haruslah didampingi oleh seseorang yang disebut pendamping, agar program yang telah diberikan membuahkan hasil (*multiplayer effect*) sehingga membawa dampak yang sangat besar yaitu seseorang yang awalnya merupakan mustahik berubah menjadi muzakki. Seseorang yang awalnya menerima zakat berubah menjadi seseorang yang menyalurkan zakat.

Hal ini sejalan dengan penelitian Hafas Furqani, Ratna Mulyany, Fahmi Yunus (2018) tentang *Zakat for Economic Empowerment (Analyzing the Models, Strategy and Implications of Zakat Productive Program in Baitul Mal Aceh and Baznas Indonesia)* menjelaskan zakat pemberdayaan ekonomi dimaksudkan untuk membangun kemampuan fakir miskin dengan memperkuat unsur-unsur pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup dengan menggunakan kekuatan sendiri. Harapannya agar masyarakat miskin mampu keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan dengan menciptakan rasa percaya dan kemampuan diri (Furqani et al., 2018).

Beberapa responden berpendapat bahwa mutasi dalam dunia zakat ini tidak selamanya baik. Seseorang yang ahli dipindahkan ke bagian lain tentu ia harus beradaptasi kembali dengan lingkungan kerja yang baru dan memulai belajar dari awal lagi. Hal ini dapat menghambat kinerja dari SDM karena untuk mendalami suatu bidang diperlukan keseriusan dan waktu untuk mempelajari semuanya.

1 orang dari responden menjawab prioritas masalah internal dalam menentukan model distribusi zakat yaitu masalah hukum dan tata kelola. Adapun masalah hukum dan tata kelola yaitu seperti (1) peralihan dana zakat dari cash ke non-cash (transfer), (2) belum memiliki database mustahik secara komprehensif, (3) pendistribusian Sebagian zakat tidak tepat sasaran, (4) kurangnya koordinasi dengan LAZ Swasta, dan (5) belum adanya sistem informasi dan teknologi di Baitul Mal.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atih Rohaeti Dariah (2012) tentang *Improving Social Capital Of Bmt (Baitul Mal Watamwil): An Experience From Bmt Lathifah, Sumedang Indonesia* menjelaskan bahwa untuk faktor internal ada dua aspek. Pertama, manajemen organisasi yang kurang optimal. Tidak ada deskripsi pekerjaan yang jelas di antara karyawan. Ini adalah sumber komunikasi yang buruk di antara mereka. Terkadang itu berkonflik ketika membuat keputusan yang akan menerima pembiayaan. Kedua, manajemen keuangan yang kurang optimal terutama akuntansi manajemen. Dalam kondisi ini, fungsi kontrol dan perencanaan tidak berjalan dengan baik.(Dariah, 2012)

Beberapa responden berpendapat bahwa amil menjadi prioritas karena Amil masih banyak yang belum mengetahui lebih dalam tentang zakat, masih harus belajar dan belajar lagi agar kualitas SDM dapat meningkat, kurangnya SDM sebenarnya tidak dipermasalahan pada masalah SDM ini, karena lebih baik dengan jumlah yang seperlunya tetapi ahli di bidangnya masing-masing atau memiliki keinginan dan komitmen untuk belajar daripada jumlah SDM Baitul Mal yang banyak tetapi tidak semuanya bekerja dengan baik. Kemudian diikuti oleh sebagian kecil tupoksi kinerja diluar keahlian atau skill sebesar 28%. Hal ini dimasukkan kedalam masalah SDM karena setelah melakukan indepth interview dengan pakar, beliau menyebutkan bahwa masih ada sebagai pegawai baik itu tenaga ahli ataupun bukan yang berasal dari program studi yang jauh bahkan diluar dari dunia zakat. Beberapa responden juga sepakat hingga menjadikan masalah ini di urutan prioritas kedua setelah

masalah pemberdayaan amil yang belum maksimal.

adanya sebagian pegawai yang terstruktur (bukan tenaga profesional) itu tidak sesuai dengan keahlian atau skill yang dimiliki. Tentu hal ini menjadi masalah karena bawahan biasanya mengikuti arahan dari atasan. Dan bila atasan tidak mengerti terakritiknya atau lambat dalam bekerja karena harus belajar dari dasar, hal ini akan menghambat pekerjaan nantinya. Persentase masalah ketiga ini beda tipis yaitu hanya 1% karena permasalahan yang hamper mirip tapi tidak sama. Kalau masalah yang kedua itu ditujukan kepada tenaga profesional atau pegawai lainnya, sedangkan masalah yang ketiga dikhususkan untuk pegawai structural.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azman Ab Rahman & Syed Mohd Najib Syed Oma tentang *Tauhid Epistemology In Increasing The Number Of Zakat-Of-Wealth Payers And Its Contribution Toward The Development Of Malaysia Economy* menjelaskan bahwa pusat atau orang yang berwenang dalam mengelola dan mendistribusikan zakat harus memainkan peran utama dalam menjelaskan pentingnya dan kewajiban untuk melakukan zakat terutama pada properti zakat atau pendapatan yang datang dalam bentuk baru; properti mustaghallat misalnya. Karena zakat pada kekayaan memiliki potensi besar untuk meningkatkan pengumpulan zakat; Semua penjelasan dan pemahaman detail diperlukan untuk dan dari masyarakat Muslim. Semua kerja keras dan upaya dari otoritas terkait dalam memberikan penjelasan secara tidak langsung akan mendorong tidak hanya kepada individu, perusahaan, dan bahkan organisasi besar tertentu untuk melakukan zakat; pada saat yang sama akan menyelesaikan fungsi dan peran yang dimainkan oleh lembaga zakat sebagai badan jaminan keadilan ekonomi dan social (Rahman & Omar, 2010).

Beberapa responden sepakat bahwa masalah sosial pertama sekali ialah masalah dengan LAZ swasta, Baitul Mal sebaiknya mengadakan lebih banyak program dan bekerjasama dengan LAZ swasta dalam program tersebut dan diharapkan agar kedua pihak untuk saling berkoordinasi terkait kendala atau perkembangan setiap tahapannya. Ketika peneliti terjun ke lapangan dan

melakukan survei, ternyata pihak Baitul Mal sudah melakukan Kerjasama dengan banyak LAZ Swasta contohnya seperti Dompot Dhuafa, Lazizmu, dll tetapi masih kurangnya sinegritas terhadapnya. Oleh sebab itu masalah minimnya sinegritas dengan LAZ Swasta ini diangkat oleh peneliti sebagai masalah sosial. kemudian diikuti oleh faktor lingkungan dan kondisi geografis sebesar 27%. Faktor lingkungan dan kondisi geografis juga menjadi masalah yang terjadi di Baitul Mal karena masalah sosial masih termasuk kedalam masalah eksternal. Adanya faktor lingkungan dan kondisi geografis menghambat lancarnya kegiatan pendistribusian zakat, dan karena adanya faktor ini pula dapat menyebabkan pendistribusian zakat yang belum merata, dan pemerintah setempat juga diharapkan selalu melakukan koordinasi kepada Baitul Mal Gampong. Lalu Baitul Mal Gampong berkoordinasi kepada Baitul Mal Kabupaten atau kota. Dan berakhir dengan berkoordinasi ke Baitul Mal pusat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azman Ab Rahman, Mohammad Haji Alias, dan Syed Mohd Najib Syed Omar tentang *Zakat Institution in Malaysia: Problems and Issues* (2012) menjelaskan bahwa mereka yang mendukung pandangan pertama akan membayar zakat dalam bentuk nyata seperti zakat untuk padi dibayar di sawah. Oleh karena itu, mereka membayar zakat bukan ke lembaga zakat karena lembaga ini jarang menerima zakat dalam bentuk nyata. Dalam beberapa kasus zakat telah diserahkan kepada orang-orang yang sah tetapi pada saat yang sama ada orang yang membutuhkan lebih banyak zakat dibandingkan dengan yang pertama. Oleh karena itu, tujuannya tidak sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, birokrasi memainkan peran lain di mana hal itu akan mengganggu proses penyaluran zakat. Keberhasilan lembaga zakat juga akan membantu untuk menyangga dampak resesi ekonomi pada orang miskin melalui peningkatan kapasitas. Mengelola zakat adalah tugas yang sangat penting. Ini tidak hanya berkaitan dengan mengumpulkan dan mendistribusikan uang, tetapi juga terkait dengan semangat untuk menegakkan Islam sebagai agama bagi seluruh umat manusia (Ab Rahman et al., 2012).

Program pembinaan zakat produktif oleh Baitul Mal sudah terlaksana sejak lama.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh tim peneliti yang masih menjadi kendala yaitu kurangnya pendamping dalam pembinaan zakat produktif terhadap UMKM ini sehingga masyarakat yang butuh untuk diberikan dorongan, menjadi kekurangan pendorong dan mengakibatkan kurang terealisasinya hasil nyata dari zakat produktif ini. Seharusnya, Baitul Mal memfokuskan untuk memberi pendamping di setiap binaan zakat produktif. Jumlah pendamping pada tiap pembinaan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang dibutuhkan UMKM tersebut.

Sehingga, program pembinaan zakat produktif ini akan menunjukkan hasil nyata dan menumbuhkan perekonomian daerah tersebut dan tentunya mendorong lebih banyak masyarakat agar berpindah dari yang konsumtif (berperilaku sebagai konsumen) menjadi produktif (berperilaku sebagai produsen).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Ilyana Muhd Adnan, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Ahmad Dahlan Salleh, Ezad Azraai Jamsari, Md Yazid Ahmad & Noor Izzati Ab Rahman tentang *Sustainability of Zakah Distribution in Baitul Mal Aceh: Basic and Implementation Methods* yang menjelaskan bahwa Tujuan dari modal usaha ini diberikan agar kondisi ekonomi masyarakat miskin dapat dikembangkan dan tidak hanya mengandalkan bantuan. Selain itu, mustahiq akan berubah menjadi muzakki suatu hari nanti. Al-Nawawi (1996) telah membahas hal ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga menggunakan distribusi ini. Dia memberikan zakat dua dirham kepada orang miskin. Satu dirham untuk pengeluaran sehari-hari dan satu dirham untuk membeli kapak. Tujuannya adalah agar orang miskin tidak lagi bergantung pada orang lain karena dia sudah memiliki kapak untuk bekerja. Keuangan mikro yang dipraktikkan Baitul Mal Aceh sejalan dengan Qanun Aceh No. 10/2007, klausul 29, distribusi zakat dalam bentuk produktif. Distribusi zakat produktif melalui keuangan mikro masih dalam kisaran hukum Islam yang diizinkan. Demikian pula, dengan 'aqad al-qard al-hasan dan 'aqad mudarabah, masih berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dari ijthadi. Peningkatan jumlah pinjaman rata-rata Rp 500.000 sebagai return yang menguntungkan melebihi 75% membuktikan bahwa keuangan mikro adalah metode yang menguntungkan. Oleh karena itu, lembaga zakat di negara-negara Muslim, terutama Malaysia, Brunei dan Singapura harus

mempertimbangkan mereka untuk diterapkan di negara masing-masing. Selain itu, penyaluran zakat melalui keuangan mikro merupakan salah satu metode distribusi untuk mewujudkan keberlangsungan zakat fitrah.. (Adnan et al., 2019)

Berdasarkan literatur review, hampir semua permasalahan yang terjadi pada Baitul Mal yaitu belum memiliki database mustahik secara komprehensif. Database berisi seluruh data atau jumlah para mustahik dan muzakki secara lengkap dan update. Baitul Mal harus melakukan pendataan ulang muzakki dan mustahik secara menyeluruh baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, ataupun di tingkat gampong. Sehingga apabila database mustahik dan muzakki yang lengkap dan terupdate sudah ada, maka tidak akan ada lagi permasalahan pendistribusian zakat yang tidak merata karena sudah dilakukan pendataan secara menyeluruh dan masalah lain yang berkaitan dengan mustahik muzakki akan ikut terselesaikan pula.

Permasalahan selanjutnya yaitu belum adanya sistem informasi dan teknologi Baitul Mal. Berdasarkan hasil *indepth interview* dengan pakar Baitul Mal, saat ini memang belum ada sistem informasi dan teknologi secara khusus untuk mengelola seluruh data Baitul Mal pada satu sistem baik itu data mustahik dan muzakki setiap tahunnya, data pegawai, laporan keuangan, dll namun sudah terencana akan dibuatnya sistem tersebut yang dinamakan dengan SIMBAMAL (Sistem Informasi Baitul Mal). Sejauh ini masyarakat masih dapat mengunjungi atau mencari informasi pada website yang dikelola secara resmi oleh Baitul Mal. Di dalam website tersebut juga terdapat informasi terupdate seputar zakat, laporan penerima dan penyalur zakat, dan masih banyak lagi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutia Sumarni tentang *The Role Of Zakat Collection By Baitul Mal In Overcoming Poverty In Langsa City* dengan hasil yang menyimpulkan bahwa Lembaga Baitul Mal belum optimal dalam menyalurkan dana zakatnya yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Langsa karena lembaga tersebut masih menerima dana bantuan minimal karena kurangnya kepercayaan pada muzakki untuk membayar zakatnya kepada Lembaga Baitul Mal dan lembaga tersebut belum tepat sasaran dalam menyalurkan zakatnya. dana zakat. ini

sebabnya Baitul Mal belum optimal salurkan dananya ke warga miskin di kota langsa.(Sumarni et al., 2021).

PENUTUP

Kesimpulan

Aspek masalah yang menjadi prioritas dalam problematika pendistribusi zakat terhadap masyarakat miskin di provinsi Aceh adalah aspek internal selanjutnya diikuti oleh eksternal.

Dalam probelmatika pendistribusi zakat terhadap masyarakat miskin di provinsi Aceh, terdapat beberapa masalah seperti masalah eksternal yang menjadi prioritas adalah masalah ekonomi, masalah internal yang menjadi prioritas adalah masalah SDM sebesar, masalah SDM yang menjadi prioritas adalah pemberdayaan amil belum maksimal, masalah sosial yang menjadi prioritas adalah minimnya sinergitas dengan LAZ Swasta

sebesar, masalah ekonomi yang menjadi prioritas adalah kurangnya pendamping pembinaan zakat produktif terhadap UMKM, serta masalah hukum dan tata kelola yang menjadi prioritas adalah belum memiliki database mustahik sebesar.

Saran

Terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan di antaranya:

1. Atas hasil penelitian ini, diharapkan menjadi bahan pengambilan kebijakan pengembangan zakat khususnya pada Baitul Mal Aceh dalam pendistribusian harta zakat, baik bagi pemerintah sebagai pemilik regulasi di Indonesia maupun bagi pihak lembaga dan pihak lainnya
2. Pengembangan penelitian dapat dilakukan pada lingkup objek yang lebih luas bukan pada objek lembaga zaka tguna menjeneralisir hasil penelitian

REFERENSI

- Ab Rahman, A., Alias, M. H., & Omar, S. M. N. S. (2012). Zakat Institution In Malaysia: Problems And Issues. *Global Journal Al-Thaqafah*, 2(1), 35–41. <https://doi.org/10.7187/GJAT122012.02.01>
- Adnan, N. I. M., Kashim, M. I. A. M., Salleh, A. D., Jamsari, E. A., Ahmad, M. Y., & Rahman, N. I. A. (2019). Sustainability Of Zakah Distribution In Baitul Mal Aceh: Basic And Implementation Methods. *International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences*, 9(1), 554–562. <https://doi.org/10.6007/Ijarbss/V9-I1/5457>
- Alam, A. (2018). Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia. *Jurnal Manajemen*, 9(2), 128–136. <https://doi.org/10.32832/Jm-Uika.V9i2.1533>
- Arthur. (2007). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. PT Raja Grafindo Pustaka.
- Dariah, A. R. (2012). Improving Social Capital Of BMT (Baitul Mal Watamwil): An Experience From BMT Lathifah , Sumedang Indonesia. *The International Journal Of Social Sciences*, 4(1), 64–70.
- Fiqih Afriadi, Y. D. S. (2016). Mengurai Permasalahan Distribusi Zakat Kepada Fakir Miskin: Pengalaman Organisasi Pengelola Zakat Baznas, Dompot Dhuafa, Dan Lazizmu. *Madania*, 20 No.1.
- Furqani, H., Mulyany, R., & Yunus, F. (2018). Zakat For Economic Empowerment (Analyzing The Models, Strategy And Implications Of Zakat Productive Program In Baitul Mal Aceh And Baznas Indonesia). *Iqtishadia*, 11(2), 391. <https://doi.org/10.21043/Iqtishadia.V11i2.3973>
- Hafidhuiddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.
- Kurnianto. (2004). *Dinamika Permasalahan Ekonomi*. Gadjah Mada University Press.
- Prasetyo, P. E., Marimin, M., & S., A. S. (2015). Model Kaji Tindak Program Pembangunan Partisipatif Pengentasan Kemiskinan Dan Rawan Pangan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(2), 217. <https://doi.org/10.23917/Jep.V11i2.326>
- Rahman, A. A., & Omar, S. M. N. B. S. (2010). Tauhid Epistemology In Increasing The Number Of Zakat-Of-Wealth Payers And Its Contribution Toward The Development Of Malaysia Economy. *Seventh International Conference*, 54.
- Sumarni, M., Islam, A., & Langsa, N. (2021). *The Role Of Zakat Collection By Baitul Mal In Overcoming Poverty In Langsa City*. 5(1), 96–102.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2000). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Erlangga.
- Widiastuti, T., Cahyono, E. F., Zulaikha, S., Mawardi, I., & Al Mustofa, M. U. (2021). Optimizing Zakat Governance In East Java Using Analytical Network Process (ANP): The Role Of Zakat Technology (Zakatech). *Journal Of Islamic Accounting And Business Research*, 12(3), 301–319. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0307>
- World Bank Institute. (2004). *Dasar-Dasar Analisis Kemiskinan*. (Terjemahan).